Vol. 22, No. 2, November 2026 *p-ISSN: 2087-3476*
Jurnal Pepatuzdu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakat *e-ISSN: 2541-5700*
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/fkip.v22i2.6285

KONSEP MADRASAH POLITIK NAHDLATUL ULAMA DALAM MEMBANGUN LITERASI POLITIK KADER

Randiawan[1]*, Muh. Khaedir[1], Mustaring[1], Matang[2]
[1]Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar
[2]Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh
***Email: randiawan@unm.ac.id**

ABSTRACT

Political literacy is an essential prerequisite for fostering a healthy democratic life. Contemporary political dynamics are characterized by the increasing prevalence of identity politics, polarization, misinformation, intolerance, and political pragmatism, which may affect the quality of citizens' participation, including among cadres of Nahdlatul Ulama (NU). This condition highlights the importance of political education that is not solely oriented toward electoral aspects but also aims to develop cadres' political knowledge, critical attitudes, ethics, and participatory skills. This study aims to describe and analyze the concept of NU Political Madrasah (Madrasah Politik) as a model of political education for cadres and its contribution to developing political literacy based on the values of Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah. The study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical design and a case study conducted within NU organizational structures in West Sulawesi, Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, documentary studies, and a review of relevant literature. The findings indicate that NU Political Madrasah constitutes a systematic, contextual, and values-based form of informal and non-formal political education grounded in Aswaja principles, namely tawassuth, tasamuh, tawazun, and i'tidal. The program strengthens cadres' political literacy by enhancing political knowledge, critical awareness, political ethics, and participatory skills in national civic life. NU Political Madrasah also serves as an instrument for addressing identity politics, political polarization, radicalism, and disinformation. Therefore, NU Political Madrasah can be regarded as an alternative model of political education rooted in religious values and pesantren traditions, capable of fostering cadres who are knowledgeable, critical, ethical, moderate, and responsible in democratic life.

Keywords: aswaja; nahdlatul ulama; political education; political literacy; political madrasah.

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi menjadi sistem yang paling banyak diminati oleh negara-negara didunia, sistem ini dianggap ideal untuk menjamin keterlibatan rakyat secara langsung. Keterlibatan politik yang aktif dan cerdas dari warga negara merupakan salah satu indikator utama kualitas kehidupan politik suatu bangsa. Partisipasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses elektoral, tetapi juga sejauh mana masyarakat memiliki literasi politik yang memadai.

Literasi politik menjadi bentuk kemampuan individu untuk memahami sistem politik, mengakses informasi politik secara kritis, serta berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dengan cara yang masuk akal dan bertanggung jawab. Sehingga pendidikan politik dalam negara demokrasi menjadi sebuah kebutuhan esensial (utama). Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menempatkan peran literasi politik sebagai kunci penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi itu sendiri. Membangun litersi politik yang dilakukan oleh partai politik, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan seringkali bersifat sektoral, elitistik, atau bahkan menjadi instrumen mobilisasi politik praktis, bukan sebagai wahana pemberdayaan warga negara (Bashori, 2018; Kusuma dkk., 2020). Demokrasi di Indonesia kerap didominasi oleh praktik politik yang transaksional, populistik, dan simbolik (Randiawan dkk., 2023).

Dalam kondisi seperti ini, partisipasi masyarakat cenderung bersifat pasif dan temporer terutama hanya muncul saat pemilu tanpa diiringi dengan kesadaran kritis terhadap substansi kebijakan, kualitas representasi, dan proses pengambilan keputusan publik. Banyak warga yang memilih berdasarkan faktor emosional, identitas keagamaan atau etnis, serta janji-janji instan, bukan berdasarkan evaluasi rasional. Penelitian ini fokus pada masalah yang berkaitan dengan Bagaimana konsep Madrasah Politik Nahdlatul Ulama (NU) dibangun dan Bagaimana nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* diterjemahkan menjadi kompetensi literasi politik. Berangkat dari titik ini peneliti ingin memfokuskan kajian bagaimana konsep Madrasah Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Membangun Literasi Politik Kader.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tidak pernah lepas dari peran politik sejak awal kelahirannya. Sejarah mencatat bahwa NU lahir dari kombinasi kepentingan keagamaan, sosial-ekonomi, dan politik, sebagai respons atas dinamika keagamaan di tingkat internasional maupun nasional (Fuad, 2020). Selama proses perjalanan Organisasi NU pernah bertransformasi menjadi partai politik pada era 1952–1973 sebelum akhirnya kembali ke *khittah* 1926 sebagai organisasi sosial-keagamaan (Fealy, 2012).

Keterlibatan NU dalam ranah politik praktis maupun politik kebangsaan tidak pernah benar-benar padam, sebab jaringan ulama, pesantren, dan struktur *jam'iyah* NU tetap menjadi basis kekuatan sosial-politik yang diperhitungkan hingga hari ini (Hayati, 2019; Fealy & Bush, 2014; Feillard, 1999). Kondisi ini menuntut NU untuk terus mempersiapkan kadernya agar memiliki kompetensi memadai dalam membaca, memahami, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik kebangsaan tanpa harus terjebak pada politik praktis yang sempit.

Sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, PBNU menggagas Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) pada tahun 2016 di bawah kepemimpinan KH. Said Aqil Siroj sebagai instrumen pembinaan kader menghadapi tantangan zaman (NU Online, 2025). Sayangnya, di tengah gencarnya program kaderisasi semacam ini, tingkat literasi politik warga dan kader NU di akar rumput masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya pemahaman terhadap fungsi kelembagaan politik, minimnya kesadaran kritis terhadap isu kebangsaan, hingga kerentanan terhadap mobilisasi politik identitas dan hoaks politik.

Padahal, pendidikan politik yang baik semestinya tidak sekadar memberi pengetahuan teknis tentang politik, melainkan juga membentuk kesadaran, sikap kritis, dan keterampilan partisipatif yang mendukung tumbuhnya demokrasi yang sehat. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana konsep Madrasah Politik yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, dan sejauhmana Nahdlatul Ulama dalam membangun literasi politik kader di lingkungan *jam'iyah* NU.

Kajian mengenai relasi NU dan politik bukanlah tema baru dalam literatur ilmu politik dan studi keislaman di Indonesia. Fealy (2012) melalui karyanya Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967 mengurai secara historis bagaimana ulama NU mengambil sikap politik dalam rentang waktu tersebut, termasuk pertimbangan ijtihad politik yang mendasarinya. Penelitian ini diperkuat oleh Fealy dan Bush (2014) yang mengkaji kemunduran peran politik ulama tradisional di Indonesia, termasuk NU, dalam relasinya dengan negara dan umat. Sementara itu, Feillard (1999) dalam NU Vis-à-Vis Negara menyoroti bagaimana NU memosisikan diri dalam berbagai rezim politik di Indonesia, dari Orde Lama hingga Orde Baru. Ketiga karya ini secara konsisten menegaskan bahwa NU memiliki tradisi panjang dalam merespons dinamika politik nasional, namun cenderung menitikberatkan analisis pada level elite ulama dan kebijakan organisasi, bukan pada proses pembentukan literasi politik di tingkat kader.

Pada ranah kajian pendidikan politik dan kaderisasi, sejumlah penelitian juga relevan untuk dikaji. Hendrik dan Danial (2021) dalam studinya tentang strategi pembinaan kader politik melalui literasi politik pada partai Golkar Kabupaten Cianjur menemukan bahwa pembinaan literasi politik berperan penting sebagai modal dasar kompetensi kader untuk berkontestasi dalam pemilihan umum. Fuad (2020) menelusuri akar sejarah moderasi Islam dalam

tubuh NU dan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan, termasuk madrasah, menjadi salah satu instrumen strategis NU dalam menjaga nilai-nilai keislaman moderat sekaligus merespons tekanan politik eksternal. Selain itu, kajian tentang peran organisasi sayap partai politik dalam kaderisasi turut menegaskan bahwa proses kaderisasi politik yang baik memerlukan sistem regenerasi yang jelas agar tidak jatuh pada pola rekrutmen oligarkis (Rido, 2020; Nuha & Maslakha, 2024). Studi-studi ini memberikan pijakan konseptual mengenai pentingnya literasi dan pendidikan politik dalam proses kaderisasi, tetapi belum secara khusus menyasar model Madrasah Politik yang dikembangkan NU sebagai lembaga informal-nonformal pengkaderan.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa kajian mengenai NU dan politik lebih banyak berfokus pada tiga arus utama: (1) sejarah relasi NU dengan negara dan kekuasaan (Fealy, 2012; Feillard, 1999; Fealy & Bush, 2014); (2) peran lembaga pendidikan NU dalam konteks moderasi keislaman (Fuad, 2020); dan (3) kaderisasi serta literasi politik pada level partai politik formal, bukan organisasi kemasyarakatan keagamaan (Hendrik & Danial, 2021; Rido, 2020). Ketiga arus ini belum secara spesifik dan mendalam mengaitkan konsep "Madrasah Politik" NU sebagai model pendidikan politik informal berbasis nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* dengan proses pembentukan literasi politik kader secara konseptual maupun operasional.

Terdapat celah penelitian (*research gap*) yang cukup jelas, yaitu belum tersedianya kajian yang secara khusus membedah konsep Madrasah Politik NU sebagai satu kesatuan model pendidikan politik kader—mencakup landasan filosofis, kurikulum nilai, metode pembinaan, hingga capaian literasi politik yang dihasilkannya dengan pendekatan yang menghubungkan wacana ke-NU-an, ilmu politik, dan pendidikan politik secara terintegrasi. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas NU dan politik secara historis-struktural atau membahas literasi politik pada konteks partai politik formal, sedangkan aspek konseptual Madrasah Politik NU sebagai ruang pembentukan kesadaran, sikap, dan keterampilan politik kader belum banyak diulas secara akademik.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya merumuskan konsep Madrasah Politik NU secara utuh sebagai model pendidikan politik alternatif berbasis nilai-nilai keagamaan tradisional, sekaligus menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan literasi politik kader di tengah tantangan demokrasi digital dan polarisasi politik kontemporer. Kebaruan ini menjadi penting mengingat literasi politik kader tidak dapat dilepaskan dari konteks lembaga yang membentuknya. Jika kajian-kajian sebelumnya lebih banyak melihat literasi politik sebagai variabel yang berdiri sendiri atau sebagai produk pembinaan partai politik semata, penelitian ini memosisikan Madrasah Politik NU sebagai unit analisis utama yang memiliki karakteristik khas, yaitu berpijak pada tradisi keilmuan pesantren, nilai *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), dan

i'tidal (adil) yang menjadi ciri khas ideologi NU. Dengan kerangka penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah kajian ke-NU-an sekaligus memberi kontribusi bagi pengembangan model pendidikan politik berbasis organisasi kemasyarakatan keagamaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep Madrasah Politik yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama sebagai model pendidikan politik kader; dan menganalisis kontribusi Madrasah Politik NU dalam membangun literasi politik kader, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan berpolitik yang selaras dengan nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah*. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan studi ke-NU-an dan pendidikan politik, sekaligus sumbangan praktis bagi pengurus dan lembaga terkait dalam merancang strategi kaderisasi politik yang lebih efektif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami dan memaknai secara mendalam suatu konsep, proses, dan praktik sosial-keagamaan yaitu konsep Madrasah Politik yang dikembangkan Nahdlatul Ulama yang tidak dapat direduksi menjadi data angka semata, tapi memerlukan pemahaman kontekstual atas nilai, wacana, dan pengalaman aktor di dalamnya (Moleong, 2017; Creswell, 2014). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), di tingkat pengurus wilayah/cabang lingkup Sulawesi Barat yang menjadi lokus penelitian untuk memperoleh gambaran utuh mengenai konsep, proses, dan hasil pembentukan literasi politik kader. Apabila akses lapangan terbatas, desain ini dapat pula dijalankan sebagai studi kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada analisis dokumen dan literatur ke-NU-an terkait konsep kaderisasi dan pendidikan politik.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu Data primer, diperoleh langsung dari informan kunci melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Kader NU yang telah mengikuti program MKNU sebagai penerima manfaat langsung program pengkaderan politik. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam penyelenggaraan Madrasah Politik NU. Data sekunder, diperoleh dari Buku, Dokumen hasil keputusan Muktamar NU terkait kaderisasi dan politik kebangsaan, Publikasi resmi Jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel. Dari hasil penelusuran melalui *Google Schoolar, Publish or Perish,* dan *Repository* peneliti menyeleksi dan mengambil 12 sumber dari

Buku/jurnal yang paling relevan dengan Variabel penelitian dengan Menggunakan dua kata Kunci utama dalam penelusuran yaitu: "Madrasah Politik", "Nahdlatul Ulama" dan "Literasi Politik". Sementara, Sumber Ilmiah yang lain dijadikan sebagai sumber pendukung Variabel penelitian.

Tabel. 1. Data Literatur Utama

Penulis	Judul	Tahun Volume/Nomor	Jenis Publikasi	Penerbit/ Jurnal
Hayati, N. R.	Politik dan Pendidikan Nahdlatul Ulama.	2019 Volume 3. Nomor 1	Jurnal	Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
Fealy, G.	Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967 (Vol. 1).	2012	Buku	Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
Fealy, G., & Bush, R.	The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama.	2014 Vol. 42. Nomor 5	Jurnal	Asian Journal of Social Science
Feillard, A.	NU Vis-à-Vis Negara.	1999	Buku	Yogyakarta: LKiS.
Syahputra, M. C.	Gerakan Literasi Politik Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Menyambut Pemilihan Umum 2019-2020.	2020 Volume 4. Nomor 2	Jurnal	Jurnal Islam Nusantara
Heryanto, G. G.	Strategi literasi politik: Sebuah pendekatan teoritis dan praktis.	2021	Buku	Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Hendrik, A., & Danial, E.	Strategi Pembinaan Kader Politik Melalui Literasi Politik.	202 Volume 21. Nomor 1	Jurnal	Jurnal Mimbar Demokrasi
Kurniawan, R.	Madrasah Politik NU dan Penguatan Kesadaran Politik	2018 Volume 13. Nomor 2	Jurnal	Jurnal Sosial Keagamaan

	Warga.			
Mahatma, M.	Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara.	2017 Volume 8. Nomor 1	Jurnal	Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan
Susanti, E.	The contribution of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in strengthening democracy in Indonesia: A study of moderate Islamic politics.	2024 Volume 1. Nomor 1	Jurnal	ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research,
Junaidi, A. R., & Tini, D. L. R.	Peran Fatayat NU dalam Gerakan Literasi Politik Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Sumenep.	2025. Volume 2. Nomor 1	Jurnal	In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nuha, M. U., & Maslakha, H.	Menelusuri Paradigma Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Konteks Bernegara.	2024 Volume 2. Nomor 1	Jurnal	NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui Wawancara secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali pemahaman mereka tentang konsep, tujuan, metode, dan dampak Madrasah Politik NU terhadap literasi politik kader. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen tertulis, modul pelatihan, arsip serta publikasi resmi NU yang relevan sebagai data pendukung dan pembanding terhadap data wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa Madrasah Politik Nahdlatul Ulama dilandasi oleh amanat Muktamar ke-33 NU di Jombang tahun 2015 tentang sistem pengkaderan organisasi, Konsep Madrasah Politik NU dalam penelitian ini dipahami sebagai ruang pendidikan politik

informal-nonformal yang bertujuan menyamakan tiga hal pokok pada diri kader, yaitu fikrah (pola pikir/paradigma), harakah (pola gerakan), dan amaliah (pola tindakan/ibadah) ke-NU-an (Anggaran Dasar NU, 2021). Beberapa hasil wawancara yang dilakukan memberikan gambaran bahwa Madrasah Politik NU dilakukan sebagai jawaban atas keresahan tidak mudahnya kader NU masuk dalam polarisasi politik yang sangat cair dan cenderung mudah untuk dikotak-kotakkan dengan kepentingan politik yang ada.

Madrasah Politik dipandang sebagai instrumen penguatan ideologis, Madrasah Politik NU juga berfungsi sebagai sarana literasi politik kebangsaan. Hal ini tampak dari orientasi Madrasah Kader Nahdlatul Ulama yang secara eksplisit menyasar penguatan wawasan kader terhadap relasi NU dan negara, penjagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta penangkalan Polarisasi politik, Intoleransi hingga Radikalisme (NU Online, 2019). Secara sederhana, Konsep Madrasah Politik NU tidak dimaksudkan sebagai sarana pendidikan politik praktis untuk kepentingan elektoral, melainkan sebagai pendidikan politik kebangsaan (*civic political education*) yang berpijak pada nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah* (Aswaja).

Nahdlatul Ulama memiliki posisi strategis dalam mendidik masyarakat, terutama para kadernya, agar menjadi aktor politik yang cerdas, kritis, dan beretika (Sobary, 2013; Nawafi, 2025). Salah satu upaya yang dilakukan NU untuk memperkuat kapasitas politik kader-kadernya adalah melalui pengembangan Madrasah Politik. Menurut Haidar (1994) Nahdlatul Ulama menjadi organisasi islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan di Indonesia untuk membentuk karakter, pemikiran, dan membawa misi islam moderat. Karena organisasi ini bergerak dalam bidang agama, pendidikan, sosial, dan politik.

Peran organisasi masyarakat berbasis agama seperti Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sangat penting. Sebagai organisasi dengan jaringan akar rumput yang luas dan otoritas moral yang kuat, NU memiliki potensi besar dalam membangun literasi politik kader dan masyarakat umum melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis nilai. Inisiatif seperti Madrasah Politik NU menjadi salah satu contoh bagaimana pendidikan politik dapat dilakukan dengan pendekatan budaya, agama, dan komunitas lokal yang lebih membumi dan berdampak langsung.

Madrasah Politik NU bukanlah sekadar lembaga pendidikan politik biasa. Ia lahir dari kesadaran historis dan ideologis bahwa kader NU perlu memiliki pemahaman politik yang mendalam, sejalan dengan prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) dan tetap berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang moderat, nasionalisme, serta keadaban publik (Fealy, 2012). Madrasah Politik ini bertujuan untuk membangun literasi politik kader, bukan hanya dalam arti teknis tentang prosedur elektoral, tetapi juga dalam makna yang lebih substansial memahami

hak-hak politik, kewajiban sebagai warga negara, prinsip-prinsip demokrasi, hingga etika dalam berpolitik (Heryanto, 2021). Madrasah politik menjadi bentuk pengembangan kemampuan kader dan masyarakat dalam meningkatkan literasi politik tentunya ini akan berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

NU memiliki dinamika hubungan yang kompleks dengan politik praktis. Sejak masa pra-kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, NU mengalami berbagai perubahan posisi dari partai politik (melalui Partai NU), kemudian kembali menjadi organisasi sosial keagamaan murni (Shobacha, 2012). Dinamika ini menunjukkan bahwa keterlibatan NU dalam dunia politik tidak pernah sepenuhnya terputus, melainkan diolah dalam berbagai bentuk pendekatan, termasuk melalui pendidikan politik.

Madrasah Politik NU menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kader-kadernya terlibat dalam politik dengan basis pengetahuan, kesadaran kritis, dan nilai-nilai etik keislaman (Latief, 2016; Azca dkk., 2021; Riyadi, 2023; Asmani, 2022). Konsep Madrasah Politik NU tidak sekadar bertujuan mencetak politisi, tetapi lebih luas, membangun masyarakat politik yang cerdas, aktif, dan bertanggung jawab. Literasi politik sendiri merupakan prasyarat utama dalam membangun masyarakat demokratis yang sehat. Literasi politik mengacu pada pemahaman individu terhadap sistem politik, kemampuan menganalisis berbagai isu politik, serta kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik (Junaidi & Tini, 2025; Farikiansyah dkk., 2024; Syahputra, 2021).

Dalam situasi saat ini hoaks, politik identitas, pragmatisme, dan polarisasi politik menguat, sehingga literasi politik menjadi benteng pertahanan masyarakat untuk tetap rasional, kritis, dan inklusif (Sihono, 2024). Konseptual Madrasah Politik NU dirancang untuk mengintegrasikan pemahaman teologis, historis, sosiologis, dan praksis tentang politik. Tidak hanya berbicara tentang strategi pemenangan pemilu, tetapi juga membahas politik dalam bingkai keadilan sosial, kebangsaan, kesejahteraan umat, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi substansial seperti keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Literasi politik saat ini menuntut transformasi dalam pendekatan pedagogis, yakni dari pendidikan yang bersifat *top-down* menjadi lebih dialogis, kontekstual, dan berbasis problematika nyata di masyarakat. Pelaksanaan Madrasah Politik NU biasanya melibatkan berbagai metode, seperti diskusi kelompok terfokus, seminar, *workshop*, simulasi parlemen, hingga studi lapangan. Madrasah politik yang dilakukan oleh NU dapat menjadi konsep yang cukup ideal dalam melakukan pendidikan politik kader dan masyarakat karena sangat mencirikan nilai keindonesiaan yang religius dan politik yang didasarkan pada kemanusian dan kesejahteraan umat.

Pelaksanaan Madrasah Politik NU telah menunjukkan kontribusi dalam meningkatkan literasi politik kader, baik dari segi pengetahuan maupun partisipasi aktif dalam ruang publik. Penelitian oleh Kurniawan (2018) di Jawa Timur menunjukkan bahwa alumni Madrasah Politik NU memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam keterlibatan mereka dalam forum-forum kebijakan desa, organisasi pemuda, dan pengawasan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa program ini bukan hanya bersifat teoritis, tetapi mampu memicu keterlibatan nyata di tingkat akar rumput.

Hasil studi pustaka yang dilakukan peneliti menelaah konsep literasi politik dengan pendekatan nilai-nilai agama khususnya islam ala NU yang mencirikan *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) yang kemudian diintegrasikan ke dalam materi dan pendekatan Madrasah Politik NU. Hal ini merupakan aspek baru dalam kajian literasi politik, karena menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagamaan moderat digunakan secara aktif untuk membentuk kesadaran politik kader dalam konteks negara demokratis.

Uraian teoritis dalam penelitian ini menggunakan kerangka literasi politik sebagai landasan analisis, serta mengkaitkannya dengan teori pendidikan politik berbasis organisasi masyarakat yang agamis. Jika ditinjau dalam kerangka praksis penelitian ini memberikan pengembangan konsep Madrasah Politik NU ke arah yang lebih strategis dan relevan dengan dinamika sosial-politik kontemporer, dalam situasi demokrasi menghadapi ancaman populisme, radikalisme, dan apatisme politik, upaya-upaya seperti Madrasah Politik NU menjadi model yang penting untuk dikembangkan.

Konsep Madrasah Politik Nahdlatul Ulama

Madrasah Politik merupakan salah satu program strategis Nahdlatul Ulama (NU) dalam membangun kesadaran politik kadernya secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*, Madrasah Politik NU bukan sekadar pelatihan teknis menuju keterlibatan elektoral, melainkan merupakan forum pendidikan politik yang dirancang untuk menumbuhkan pemahaman politik yang kritis, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta integritas kebangsaan.

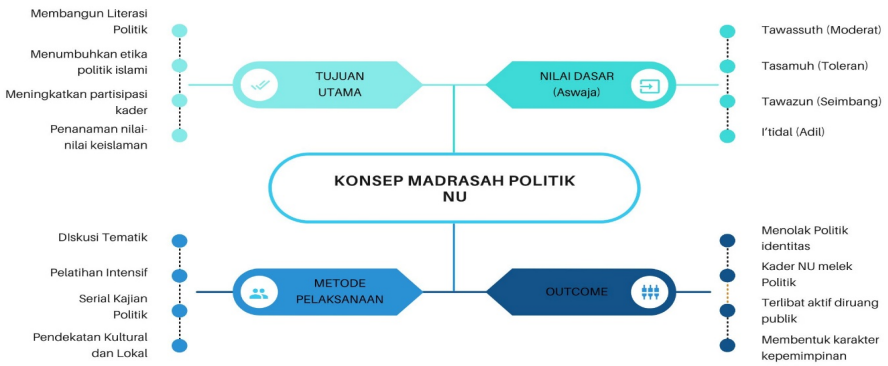
Program Madrasah Politik NU pertama kali diperkenalkan secara formal pada periode pasca-reformasi, sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan kaderisasi politik yang ideologis namun tetap inklusif terhadap dinamika demokrasi modern. Menurut Gusdur (dalam Sari & Dozan., 2021) Madrasah Politik NU merupakan upaya NU untuk memadukan antara nilai-nilai spiritual keislaman dengan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan politik yang bertanggung jawab. Madrasah ini dimaksudkan untuk mencetak kader yang memahami sistem politik nasional, mampu membaca dinamika sosial-politik secara tajam, serta memiliki etika politik yang selaras dengan prinsip *tawassuth*

(moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (adil) (Sirin & Sholeh, 2021).

Konsep Madrasah Politik NU bersifat non-formal dan kontekstual, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan kader di masing-masing wilayah. Hal ini terlihat dari model penyelenggaraannya yang dilakukan secara modular dan fleksibel. Di dalam beberapa daerah, Madrasah Politik dilaksanakan dalam bentuk pelatihan intensif selama beberapa hari, sementara di tempat lain dilakukan dalam bentuk serial diskusi tematik yang melibatkan tokoh NU, akademisi, dan praktisi politik. Modul-modul pembelajaran mencakup berbagai topik strategis, antara lain: sejarah politik NU, dasar-dasar sistem politik Indonesia, politik kebangsaan, etika politik dalam Islam, strategi advokasi kebijakan publik, serta keterampilan komunikasi politik.

Madrasah Politik juga menjadi arena konsolidasi ideologis NU dalam menghadapi arus politik identitas dan polarisasi sosial (Mahatma, 2017). Melalui Madrasah ini, NU menanamkan prinsip *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air sebagian dari iman), dan menolak keras bentuk politik yang eksklusif, radikal, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Sebagaimana ditegaskan dalam hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung (2021), NU mendorong kader-kadernya untuk menjadi "penjaga moralitas politik bangsa", bukan sekadar pemain dalam kontestasi kekuasaan.

Dari penggambaran di atas konsep Madrasah Politik NU tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar misi dakwah sosial-politik NU, yang menekankan pendidikan, pemberdayaan, dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Ini menjadi pembeda utama dibanding pendidikan politik lain yang cenderung pragmatis dan elitis. Melalui pendekatan budaya, nilai, dan kaderisasi ideologis, Madrasah Politik NU menjadi alternatif strategis dalam membentuk generasi politik yang cerdas, etis, dan berpihak pada rakyat.



Gambar 1. Konsep Madrasah Politik NU

Konsep Madrasah Politik Nahdlatul Ulama yang dikaji dalam penelitian ini disusun berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen ilmiah, publikasi resmi organisasi, serta literatur akademik yang membahas relasi Nahdlatul Ulama dengan dinamika politik dan pendidikan kader. Penyusunan konsep ini tidak dilakukan secara spekulatif, melainkan melalui proses telaah kritis atas berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu yang kemudian dipadukan dengan data dokumentasi penyelenggaraan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) di berbagai daerah. Sehingga, konsep Madrasah Politik NU yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan hasil sintesis akademik, bukan sekadar deskripsi normatif organisasi, sehingga memiliki landasan epistemologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain berpijak pada sumber-sumber ilmiah tersebut, pengembangan konsep ini juga dilakukan melalui proses akademis oleh peneliti, yakni dengan mengaitkan temuan lapangan dan data dokumenter dengan kerangka teoretis literasi politik serta teori pendidikan politik yang relevan. Peneliti tidak semata-mata mereproduksi narasi kelembagaan NU, melainkan melakukan analisis, interpretasi, dan konstruksi ulang atas data yang diperoleh sehingga membentuk sebuah konsep yang koheren, sistematis, dan dapat diuji secara akademik. Proses ini menegaskan bahwa konsep Madrasah Politik NU dalam penelitian ini merupakan produk kerja ilmiah yang objektif, dibangun melalui metodologi penelitian yang jelas, serta terbuka untuk dikritisi, diverifikasi, dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku.

Konsep ini memberikan gambaran yang Madrasah Politik NU merupakan sebuah model pendidikan politik yang dikembangkan sebagai respons terhadap rendahnya tingkat literasi politik kader di lingkungan NU serta meningkatnya gejala politik identitas, polarisasi sosial, dan pragmatisme kekuasaan. Berbeda dengan pelatihan politik konvensional yang berfokus pada aspek teknokratis dan elektoral, Madrasah Politik NU menekankan pada pendidikan nilai dan etika politik berbasis *Aswaja an-Nahdliyah* (*Ahlussunnah wal Jama'ah*).

Temuan dokumentasi terhadap penyelenggaraan Madrasah Politik atau yang disebut sebagai Madrasah Kader di berbagai wilayah menunjukkan secara garis besar bahwa materi yang diberikan seperti yang tergambarkan dalam tabe berikut:

Tabel 2. Kurikulum Madrasah Politik NU

Nilai Dasar	Materi Pokok	Deskripsi
Nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* (tawassuth, tasamuh,	Aswaja dan Khittah NU dalam Politik.	Pemahaman Aswaja (tawassuth, tasamuh, tawazun, i'tidal) sebagai

tawazun dan i'tidal)		landasan sikap politik NU
	Etika Politik Islam: *Fiqh Siyasah*	Konsep kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam perspektif fikih
Nilai Budaya	Politik Kultural dan Kearifan Lokal NU	Peran budaya lokal dalam pendekatan politik NU dan penguatan identitas kultural dalam demokrasi.
	Bahasa Politik Nahdliyin: Dakwah, Humor, Simbolisme Tradisional	Strategi komunikasi politik NU berbasis budaya dan narasi khas pesantren
Nilai Sosial	NU dan Gerakan Sosial Umat	Transformasi sosial melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, dan advokasi kebijakan publik
	Peran Kader NU dalam Pemberdayaan Masyarakat	Studi kasus keberhasilan kader NU dalam menggerakkan perubahan sosial di tingkat desa/kota
Nilai Politik	Sistem Politik Indonesia dan Relasi Islam-Negara	Pemahaman Pancasila, UUD 1945, demokrasi konstitusional, dan hubungan agama-negara
	Analisis Politik Kebangsaan dan Politik Identitas	Identifikasi isu sektarianisme, radikalisme, dan peran NU dalam menjaga keutuhan NKRI
	Strategi Advokasi, Kebijakan Publik, dan Pemilu	Peran kader dalam kebijakan publik, pengawasan, dan pemilu berintegritas
	Simulasi Politik dan Rencana Aksi Kader	Peserta merancang aksi konkret berbasis nilai NU dalam komunitas

(Sumber: Hasil olah data, 2026)

Pola ini konsisten ditemukan di berbagai daerah penyelenggaraan Madrasah Kader NU, mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Barat, yang menunjukkan adanya standardisasi kurikulum dari Pengurus Besar NU (PBNU) meskipun pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada masing-masing Pengurus Wilayah/Cabang. Struktur ini relevan dengan temuan lapangan pada lokus penelitian di Sulawesi Barat.

Data wawancara dengan kader yang telah mengikuti Madarasah Kader NU menunjukkan adanya perubahan pada tiga dimensi literasi politik, sebagaimana kerangka literasi politik yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan partisipatif (Hendrik & Danial, 2021). Dalam program ini yang paling ditekankan adalah, Pengetahuan sebagai kemampuan kognitif kader terhadap sejarah dan posisi politik NU, mekanisme kenegaraan, atau isu-isu kebangsaan. Pembentukan sikap sebagai bentuk penguatan karakter moderat/*tawasuth*, penolakan terhadap politik identitas dan ujaran kebencian, serta loyalitas terhadap NKRI. Keterampilan yang dibangun merupakan bentuk partisipasi dan kemampuan kader dalam menyusun program kerja, memfasilitasi diskusi warga, atau terlibat aktif dalam forum-forum kebangsaan di tingkat akar rumput.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia memiliki kontribusi historis dan ideologis dalam merawat demokrasi, kebinekaan, serta nilai-nilai kebangsaan (Ismail, 2020; Susanti, 2024). Pendidikan politik bagi kader NU bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga proses internalisasi nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) yang menjadi fondasi etis dan spiritual dalam berpolitik. Bradasarkan sumber literatur yang ditelaah Tabel kurikulum yang disusun mencerminkan pendekatan multidimensi nilai dasar, budaya, sosial, dan politik yang bertujuan membentuk kader berintegritas, visioner, serta relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Nilai-nilai Aswaja seperti *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (adil) menjadi kerangka normatif yang mengatur sikap politik warga NU. Politik dalam perspektif Aswaja tidak bersifat pragmatis, tetapi berlandaskan pada keadaban, etika, dan kemaslahatan umat. Melalui materi ini, kader NU didorong untuk menjadikan politik sebagai sarana amar ma'ruf nahi munkar, bukan arena perebutan kuasa semata.

Dimensi etis dari politik juga diperkuat melalui kajian *fiqh siyasah*, yang mencakup konsep kepemimpinan ('imamah), keadilan ('adl), dan tanggung jawab sosial (Hayatuddin, dkk., 2025). Pendidikan ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memenuhi kriteria integritas moral, kapasitas administratif, dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Syafuri (2025) *Fiqh siyasah* tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah (tujuan-tujuan syariat).

NU dikenal dengan strategi politik kultural dengan pendekatan berbasis tradisi lokal, seperti tahlilan, slametan, dan pengajian sebagai bentuk konsolidasi massa dan penyebaran nilai kebangsaan. Materi ini memperlihatkan bagaimana budaya menjadi instrumen politik yang santun dan membumi, serta berfungsi sebagai penopang identitas dalam era demokrasi. Strategi komunikasi politik NU tidak lepas dari bahasa khas pesantren, seperti dakwah berbasis humor, simbolisme tradisional (sarung, peci, kitab kuning), dan narasi lokal. Ini memperlihatkan bahwa politik bukanlah wilayah yang eksklusif dan elitis, melainkan bisa didekati dengan pendekatan naratif yang menyentuh hati masyarakat akar rumput. Pendekatan ini juga menjadi sarana deradikalisasi politik melalui jalur budaya.

Madrasah Politik Nahdlatul Ulama Membangun Literasi Politik

Konteks demokrasi modern, literasi politik menjadi elemen fundamental dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan tanggung jawabnya (Kadir, 2022; Vinanda dkk, 2025). Literasi politik bukan hanya menyangkut kemampuan memahami struktur dan proses politik, tetapi juga mencakup kesadaran kritis untuk berpartisipasi aktif dalam ruang-ruang demokrasi. Untuk itu, berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), telah mengembangkan model pendidikan non-formal yang disebut *Madrasah Politik* sebagai strategi penguatan literasi politik, khususnya di kalangan kader dan masyarakat akar rumput.

Landasan Konseptual

Madrasah Politik menjadi bentuk pendidikan politik alternatif yang berakar pada nilai-nilai kultural dan ideologis suatu komunitas. Dalam konteks NU, misalnya, pendidikan politik ini dibangun atas dasar prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja), yang menjunjung nilai *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (adil). Nilai-nilai ini menjadi kerangka normatif dalam penyampaian materi politik sehingga tidak hanya menekankan aspek teknokratis, tetapi juga etika politik yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Efektivitas Madrasah Politik dalam membangun literasi politik dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama:

1. Peningkatan Pengetahuan Politik
   Menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik nasional, fungsi lembaga negara, proses legislasi, pemilu, dan peran partai politik. Studi kualitatif pada pelaksanaan Madrasah Politik NU di beberapa daerah menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap isu-isu konstitusional dan kebijakan publik.
2. Kesadaran Kritis dan Etika Politik
   Madrasah Politik tidak hanya mengisi pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran kritis. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta untuk mengevaluasi kebijakan, mengidentifikasi hoaks politik, dan menempatkan

diri secara etis dalam wacana politik, aspek ini penting dalam menghadapi tantangan politik identitas dan populisme politik.

3. Peningkatan Partisipasi Politik
   Efektivitas program juga tercermin dari meningkatnya partisipasi kader dalam kegiatan politik, baik formal (seperti menjadi caleg, pemantau pemilu) maupun non-formal (seperti advokasi kebijakan, diskusi publik). Madrasah Politik berfungsi sebagai *inkubator kader politik* yang siap bergerak dalam koridor demokrasi substantif.
4. Transformasi Sosial Komunitas
   Literasi politik yang dibangun melalui Madrasah Politik sering berdampak lanjut pada dinamika sosial masyarakat. Peserta yang telah memperoleh kesadaran politik kerap menjadi agen perubahan yang menyuarakan isu-isu publik, memperjuangkan keadilan sosial, dan memperkuat solidaritas horizontal dalam komunitas.

Madrasah Politik Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu bentuk inovatif pendidikan politik komunitas yang paling otentik dan kontekstual. Ia lahir bukan dari laboratorium akademik atau institusi negara, melainkan dari kebutuhan nyata untuk membangun kesadaran politik yang berakar pada nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal.

Madrasah Politik NU dari inisiatif serupa adalah fondasi ideologisnya yang kokoh nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) dengan prinsip *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (adil). Ini menjadi landasan moral dan epistemologis dalam membangun literasi politik. Dengan kata lain, Madrasah Politik NU tidak hanya mengajarkan apa itu politik, tetapi juga bagaimana bersikap secara etis dalam berpolitik.

Dari hasil penelitian mengenai Madrasah Politik NU di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat terlihat bahwa materi ajar tidak hanya berisi konsep sistem pemerintahan dan pemilu, tetapi juga bagaimana menjadi *ra'iyah* (warga negara) yang bertanggung jawab, serta bagaimana memahami posisi NU secara historis dan politik tanpa kehilangan jati diri.

Kelebihan Strategis Nahdlatul Ulama dalam Pendidikan Politik

Nahdlatul Ulama memiliki modal sosial yang kuat yaitu struktur organisasi yang mengakar hingga level ranting, jaringan pesantren, dan kiai-kiai kharismatik yang menjadi panutan umat. Ini menjadikan Madrasah Politik NU tidak berjalan dalam ruang hampa, tetapi ditopang oleh ekosistem sosial-budaya yang memungkinkan proses transformasi politik berlangsung secara berkelanjutan dan tidak elitis.

Pendekatan kultural-religius NU terbukti mampu mengurangi resistensi terhadap pendidikan politik. Di masyarakat yang skeptis terhadap kata "politik",

Madrasah Politik NU hadir dengan wajah humanis dan edukatif, bukan instruktif apalagi partisan. Madrasah Politik NU adalah model pendidikan politik yang efektif dan adaptif, terutama dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang religius-kultural. Keberhasilannya tidak hanya pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga dalam membangun integritas, etika, dan partisipasi politik yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Jika negara ini ingin menyelamatkan demokrasi dari erosi nilai dan manipulasi massa, maka mendukung dan mereplikasi model seperti Madrasah Politik NU adalah sebuah keniscayaan.

Kurikulum Madrasah Politik NU menunjukkan bahwa pendidikan politik kader NU tidak hanya berorientasi pada kompetensi teknokratis, tetapi lebih jauh menyentuh dimensi nilai, budaya, sosial, dan spiritual. Aswaja sebagai landasan ideologis, politik kultural sebagai metode, dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan menjadikan kader NU siap terlibat dalam dinamika politik tanpa kehilangan identitas moral dan keagamaan.

Keterpaduan antara nilai dasar, pendekatan budaya, orientasi sosial, dan strategi politik mencerminkan visi politik NU yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan politik semacam ini berperan penting dalam melahirkan pemimpin-pemimpin NU yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berakar kuat pada tradisi dan komitmen kebangsaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap berbagai literatur, dokumen organisasi, dan kajian akademik mengenai konsep Madrasah Politik Nahdlatul Ulama (NU) dan beberapa hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Madrasah Politik merupakan strategi pendidikan politik yang dirancang secara sistematis dan ideologis untuk membangun literasi politik kader NU. Konsep ini berakar kuat pada nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) an-Nahdliyah yang moderat *(tawassuth)*, toleran *(tasamuh)*, seimbang *(tawazun)*, dan adil *(i'tidal)*, serta didukung oleh struktur kelembagaan NU yang mengakar di tingkat akar rumput.

Konsep ini tidak diarahkan pada politik praktis-elektoral, tetapi diarahkan pada penguatan pendidikan politik kebangsaan yang mencakup penanaman wawasan ideologis dan keorganisasian. Sehingga, struktur materi yang relatif terstandardisasi di berbagai wilayah menunjukkan bahwa Madrasah Politik NU berjalan sebagai sistem pengkaderan yang sistematis, bukan sekadar kegiatan seremonial organisasi, dan menjadi kelanjutan dari tradisi panjang NU dalam merumuskan serta mendiseminasikan sikap politiknya sejak era ulama generasi awal hingga struktur organisasi modern saat ini.

Temuan ini sekaligus menjawab *research gap* yang diajukan pada bagian Pendahuluan, dengan menegaskan bahwa Madrasah Politik NU merupakan model literasi politik alternatif yang khas berbasis nilai keagamaan tradisional pesantren

yang belum banyak diulas secara mendalam dalam kajian-kajian sebelumnya, yang cenderung berfokus pada relasi NU-negara secara historis-struktural atau pada literasi politik dalam konteks partai politik formal.

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan diatas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. *Pertama,* bagi pengurus Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan, perlu dilakukan evaluasi dan penguatan berkelanjutan terhadap kurikulum Madrasah Politik NU agar lebih responsif terhadap tantangan literasi politik digital, seperti disinformasi dan polarisasi di media sosial. *Kedua,* bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan dapat diperbandingkan antarwilayah, serta mempertimbangkan pendekatan kuantitatif atau mixed-methods untuk mengukur secara lebih terukur dampak Madrasah Politik NU terhadap literasi politik kader dalam skala yang lebih luas. *Ketiga,* bagi pemangku kebijakan pendidikan politik nasional, model Madrasah Politik NU dapat dijadikan salah satu referensi dalam merancang program pendidikan politik berbasis komunitas keagamaan sebagai pelengkap pendidikan politik formal di sekolah maupun perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Asmani, J. M. M. (2022). *Jihad Keilmuan dan Kebangsaan Pesantren*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Azca, M. N., Salim, H., Arrobi, M. Z., Asyhari, B., & Usman, A. (2021). *Dua menyemai damai: peran dan kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam perdamaian dan demokrasi*. Yogyakarta: UGM PRESS.

Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, *2*(2), Hal 287-310. https://doi.org/10.32533/02207.2018

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Farikiansyah, I. M., Salamah, M. N., Rokhimah, A. U., Ma'rifah, L., Faruq, F. N. F., & Al Gufron, M. A. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Education Research*, *5*(4), Hal 6512-6523.

Fealy, G. (2012). *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967* (Vol. 1). Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

Fealy, G., & Bush, R. (2014). The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama. *Asian Journal of Social Science*, 42(5), 536–560.

Feillard, A. (1999). *NU Vis-à-Vis Negara*. Yogyakarta: LKiS.

Fuad, A. J. (2020). Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 153–168. https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991

Haidar, M. A. (1994). *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: pendekatan fikih dalam politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hayati, N. R. (2019). Politik dan Pendidikan Nahdlatul Ulama. *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 3(1), 58-74.

Hayatuddin, H., Jumhadi, A. I., Khaerudin, K., Bamukmin, N., Hidayat, R., & Saparudin, I. (2025). FIQH TANZIL, FIQH WAQI', DAN FIQH MA'AALAT: Kajian Fiqh pada Strategi Dakwah dalam Ayat-Ayat Jihad. *Moderation | Journal of Islamic Studies Review*, *5*(1), 121-140.

Hendrik, A., & Danial, E. (2021). Strategi Pembinaan Kader Politik Melalui Literasi Politik. *Jurnal Mimbar Demokrasi*, 21(1), 41–47. http://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.22399

Heryanto, G. G. (2021). *Strategi Literasi Politik: Sebuah Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Ismail, H. F. (2020). NU, Moderatisme, dan Pluralisme: Konstelasi Dinamis Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Kebangsaan. IRCiSoD.

Junaidi, A. R., & Tini, D. L. R. (2025, February). Peran Fatayat NU dalam Gerakan Literasi Politik Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Sumenep. *In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 2, No. 1, pp. 562-574).

Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, 4(2), 180-197.

Kurniawan, R. (2018). "Madrasah Politik NU dan Penguatan Kesadaran Politik Warga." *Jurnal Sosial Keagamaan*, 13(2), Hal 175-190.

Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1*(1), Hal 164-169. https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2150.164-169

Latief, A. (2016). Kompatibilitas Ajaran Islam dengan HAM. *Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, *4*(1), 14-29.

Mahatma, M. (2017). Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, *8*(1), 31-54.

McMillan, J. H. (2012). *Educational Research: Fundamentals for the Consume*. Pearson.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawafi, A. Y. A. (2025). Jaringan Keagamaan dan Strategi Politik Lokal: Mediasi Politik Nahdlatul Ulama. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(4), 1003-1018.

Nuha, M. U., & Maslakha, H. (2024). Menelusuri Paradigma Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Konteks Bernegara. *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 2(1), 205-220.

Rido, A. (2020). Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik dengan Partai Politik di Indonesia [terkait kajian: Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai]. *Jurnal SASI*, 27(4), 485–496.

Randiawan, R., Suryadi, K., & Bestari, P. (2023). Analysis of the construction of the meaning of political populism as phenomenology in the perspective of civic education. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, *8*(3), 419-430.

Riyadi, A. A. (2023). *Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Industri*. Jepara: UNISNU PRESS.

Sari, E. S., & Dozan, W. (2021). Konsep Pluralisme Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid (Gus Dur). *TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, *10*(2), Hal 21-39. https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.770

Susanti, E. (2024). The contribution of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in strengthening democracy in Indonesia: A study of moderate Islamic politics. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, *1*(01), 123-136.

Sobary, M. (2013). *NU dan Keindonesiaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sihono, S. (2024). Tantangan Politik di Indonesia Tahun 2024: Membangun Kepemimpinan Pendidikan Islam. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, *4*(2), Hal. 491-506. https://doi.org/10.14421/njpi.2024.v4i2-12

Sirin, K., & Sholeh, B. (2021). *Ormas Islam dan Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia*. Rajawali Pers.

Shobacha, N. (2012). Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru. *JRP (Jurnal Review Politik)*, *2*(1), Hal. 99-113. https://doi.org/10.15642/jrp.2012.2.1.99-113

Syafuri, H. B. (2025). Fiqih Siyasah di Era Globalisasi.

Vinanda, O. R., Atari, C., Pratama, M. A., Arya, M. B., Azahra, N. D., & Apriansyah, R. (2025). Fungsi Sosialisasi, Rekrutmen, Dan Komunikasi Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Efektif. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *2*(5), 10312-10316.